

JURNAL

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI UNTUK
MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI TERTANGGUNG SEBAGAI
KONSUMEN**

(Studi Pada Polis Asuransi Jiwa Prudential)



Diajukan oleh :

Carolina

NPM : 120510793

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN ASURANSI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI
TERTANGGUNG SEBAGAI KONSUMEN
(Studi Pada Polis Asuransi Jiwa Prudential)



Diajukan oleh :

Carolina

NPM : 120510793

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 11 Desember 2015

F. X. Suhardana, S. H., M. H.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Atma Jaya Yogyakarta

FX. Endro Susilo, S. H., LL.M.

ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI TERTANGGUNG SEBAGAI KONSUMEN

(Studi Pada Polis Asuransi Jiwa Prudential)

Carolina

Abstract

Applying standard clause on assurance agreement make existence of the principle of freedom of contract as a most important principle in contract law is lack. This research discusses about the implementation of the principle of freedom of contract on assurance agreement to give a justice for endured as a consumer. The method that use on this research is normative juridical method, this approach method uses approach of regulation of law in Indonesia and approach of analysis, the law materials which obtained from document, literature, journal, doctrine, and law principle. The data obtained from resource person and legislation product related Prudential life assurance agreement as an object of research. Materials analysis which compare between the document of Prudential Life Assurance agreement and the regulation of law that related with assurance agreement. The result from this research is assurance agreement especially in Prudential Life Assurance Agreement has been implementation the principle of the freedom of the contract, that give 14 days' period of time to endured for cancel the agreement. According to this research, on making of standard clause that will be put on assurance agreement must be involving consumer protection institute to extend justice for endured as a consumer.

Keywords: *implementation, freedom of contract, assurance agreement, justice, consumer.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dalam industri perasuransian baik secara nasional maupun global telah mengalami peningkatan secara pesat. Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian atau risiko. Pada hakikatnya risiko dapat menimpa setiap orang. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menanggulangi, atau memperkecil risiko tersebut dengan jalan mengalihkannya pada pihak lain yaitu melalui perjanjian asuransi.

Pengertian asuransi berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut Undang-Undang Perasuransian) adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya

- suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Rumusan dalam Undang-Undang Perasuransian ini tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, melainkan juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kalimat huruf b yaitu “untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”. Dengan demikian, objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan melainkan juga jiwa/raga manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 302 KUHD yaitu bahwa jiwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidup ataupun untuk suatu waktu yang ditentukan dengan perjanjian

Berdasarkan pada Pasal 255 KUHD, disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis. Dari ketentuan tersebut perjanjian asuransi dapat digolongkan sebagai perjanjian formal, karena bentuk perjanjian tersebut telah ditentukan secara jelas oleh Undang-Undang yaitu harus secara tertulis dan dituangkan dalam akta yang disebut polis. Khusus polis asuransi jiwa berdasarkan Pasal 304 KUHD harus memuat:

1. Hari pengadaaan pertanggungan itu;
2. Nama tertanggung;

3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan;
4. Nama bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan;
6. Premi pertanggunggannya.

Salah satu cara yang digunakan perusahaan asuransi agar transaksi-transaksi dapat dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, adalah dengan menggunakan perjanjian baku. Pada perjanjian baku, klausula-klausula dalam perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih dominan. klausula-klausula tersebut umumnya cenderung lebih mengutamakan hak-hak pihak yang merumuskan klausula yang bersangkutan.

Klausula baku dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) diartikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam perjanjian asuransi jiwa, klausula baku tersebut ditentukan oleh pihak penanggung yang dituangkan dalam polis asuransi jiwa. Pihak tertanggung tidak bisa bernegosiasi mengenai klausula dalam polis tersebut, pilihannya adalah menerima atau menolak polis tersebut

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian asuransi apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini secara tersirat mengatur mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Namun, kebebasan ini bukanlah tanpa batas, tetapi dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Digunakannya klausula baku dalam perjanjian asuransi jiwa, maka telah membuat pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pada umumnya harus berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, diantara pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi. Penggunaan klausula baku tersebut dalam polis asuransi membuat eksistensi asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas sentral dalam hukum perjanjian mulai terkikis. Padahal asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang melandasi munculnya jenis perjanjian baru yang mungkin dibutuhkan, sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan yang harus dijawab, adalah bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi untuk mewujudkan keadilan bagi tertanggung sebagai konsumen? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi untuk mewujudkan keadilan bagi tertanggung sebagai konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum

normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi untuk mewujudkan keadilan bagi tertanggung sebagai konsumen. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen dokumen berupa Polis Asuransi Jiwa Prudential, internet, dan kamus hukum, serta pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber. Bahan hukum primer dan sekunder ini akan di analisis, dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaannya untuk mengkaji mengenai implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi dan mengkaji mengenai keadilan bagi tertanggung sebagai konsumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Asuransi Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Tertanggung Sebagai Konsumen

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian.¹ Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai aliran filsafat politik dan

¹ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 229.

ekonomi liberal yang berkembang pada abad kesembilan belas. Dalam bidang ekonomi berkembang aliran *laissez faire* yang dipelopori Adam Smith yang menekankan prinsip non-intervensi oleh pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar.²

Kebebasan berkontrak oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ahmadi Miru mengatakan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas dari sifat Buku III KUHPerdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur, sehingga para pihak dapat menyimpangkannya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.³

Setiap orang berdasarkan asas kebebasan berkontrak, diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, dan memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Jika asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak, dan asas kekuatan mengikatnya kontrak berkaitan dengan akibat hukum dari suatu kontrak, maka

asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak.⁴

Asas kebebasan berkontrak dalam penerapannya terdapat pembatasan, sehingga bukan bebas dalam arti yang sebebas-bebasnya. Menurut Abdulkadir Muhammad, kebebasan berkontrak dibatasi oleh tiga hal yaitu: (1) tidak dilarang oleh undang-undang, (2) tidak bertentangan dengan kesusilaan, (3) tidak bertentangan dengan kepentingan umum.⁵ Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak menurut Mariam Darus Badruzaman sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, semakin sempit dilihat dari beberapa segi, yaitu : (1) dari segi kepentingan umum, (2) dari segi perjanjian baku, (3) dari segi perjanjian dengan pemerintah.⁶

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak mempunyai kaitan dengan sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila dalam membuat suatu perjanjian, melanggar syarat subjektif untuk sahnya suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), dan apabila melanggar syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Suatu perjanjian pada dasarnya harus dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, diantara pihak yang mempunyai kedudukan seimbang, dimana kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian

² Ridwan Khairandy, 2011, *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus, Vol. 18 Oktober 2011: 36-55, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

³ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 4.

⁴ Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 84.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, hlm. 230.

melalui suatu proses negosiasi. Namun adakalanya kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.⁷ Perjanjian yang demikian disebut perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis dimana hampir seluruh klausula-klausula dalam perjanjian tersebut sudah dibakukan. Klausula tersebut ditentukan secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih dominan dalam suatu perjanjian, dan pihak lainnya tidak mempunyai pilihan selain menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Penggunaan perjanjian baku dalam bisnis asuransi jiwa, wujudnya adalah berupa polis asuransi jiwa, dimana dalam polis tersebut, klausula-klausulanya sudah ditetapkan secara sepihak oleh penanggung. Calon tertanggung tidak bisa menawar ketentuan yang terdapat dalam polis. Polis asuransi jiwa berdasarkan Pasal 255 KUHD merupakan suatu keharusan yang ditentukan oleh Undang-Undang, bahwa asuransi atau pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis. Oleh karena itu, meskipun perjanjian asuransi jiwa bersifat konsensual yaitu terjadi seketika pada saat tercapainya kata sepakat, tetapi karena Undang-Undang menentukan bahwa harus dilakukan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk akta polis, maka perjanjian asuransi jiwa bisa digolongkan sebagai perjanjian formal.

Hakikat polis asuransi jiwa adalah untuk membuktikan adanya perjanjian asuransi jiwa, tetapi polis bukan sebagai satu-satunya alat bukti dalam perjanjian asuransi. Apabila polis belum dibuat, pembuktian dapat dilakukan dengan catatan, nota, surat perhitungan, telegram dan sebagainya, surat-surat ini yang disebut permulaan bukti tertulis (*the beginning of writing evidence*). Apabila permulaan bukti tertulis ini sudah ada, barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata.⁸

Polis asuransi jiwa berdasarkan pada Pasal 304 KUHD harus memuat 6 (enam) elemen yaitu:

- a. Hari pengadaan pertanggungan itu;
- b. Nama tertanggung;
- c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
- d. Nama bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
- e. Jumlah uang yang dipertanggungkan;
- f. Premi pertanggunggannya.

Secara garis besar ketentuan yang dimuat Polis Asuransi Jiwa Prudential, yang merupakan obyek penelitian penulis, adalah sebagai berikut:

- a. Komparasi
- b. Ringkasan Polis;
- c. Ketentuan Umum Polis
- d. Ketentuan Khusus Berkaitan Dengan Keadaan Tertentu
- e. Ketentuan Khusus Asuransi Dasar (*Prulink Assurance Account*)
- f. Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan
- g. Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis

⁷Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 53.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, cetakan kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

- h. Tabel Kategori Tindakan Bedah
- i. Tabel Biaya Administrasi
- j. Fotocopy Lampiran Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Pengaturan dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential sangat lengkap dan terperinci. Apabila ketentuan dalam polis tersebut terdapat syarat-syarat yang belum ditentukan oleh para pihak, maka ketentuan yang ada dalam undang-undang yang mengaturnya, dianggap berlaku dalam polis tersebut. Hal ini merupakan unsur *naturalia* suatu perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.⁹ Hal ini merupakan dampak dari sifat terbuka hukum perjanjian. Dalam Pasal 1339 KUHPdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Berdasarkan pada Pasal 305 KUHD, bahwa perencanaan jumlah uang dan penentuan syarat pertanggungan dalam perjanjian asuransi jiwa sama sekali diserahkan kepada persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut mencerminkan asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak diberi kebebasan untuk menentukan syarat-syarat dalam polis. Selain mencerminkan asas kebebasan berkontrak, ketentuan itu juga terkait dengan Pasal 1320 KUHPdata huruf

a bahwa perjanjian harus berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, dan untuk tercapainya kesepakatan tidak boleh diperoleh dari paksaan, penipuan maupun kekhilafan.

Kesepakatan dalam perjanjian asuransi jiwa, apabila diperoleh dengan paksaan, kekhilafan maupun penipuan, maka perjanjian yang demikian dapat dibatalkan. Dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential ketentuan mengenai pembatalan polis diatur dalam ketentuan umum Pasal 15.8 yang pada intinya mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPdata, dimana seharusnya untuk pembatalan suatu perjanjian membutuhkan adanya putusan atau penetapan pengadilan. Dengan mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPdata maka untuk pembatalan Polis Asuransi Jiwa Prudential tidak membutuhkan putusan atau penetapan pengadilan. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk implementasi asas kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan para pihak untuk mengesampingkan berlakunya hukum yang bersifat mengatur atau opsional (*aanvullendrecht*).

Terkait dengan penggunaan klausula baku dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential, klausula baku tersebut pada dasarnya muncul karena adanya asas kebebasan berkontrak. Para pihak berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, mempunyai kebebasan untuk menentukan isi dari suatu perjanjian. Dalam perjanjian baku, yang menentukan isi perjanjian adalah pihak penanggung, tetapi hanya mengenai syarat-syarat yang tidak terkait dengan unsur esensialia suatu perjanjian.

Unsur esensialia adalah sesuatu yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, yang mengandung

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm. 119.

suatu ketentuan mengenai prestasi-prestasi para pihak, dalam hal ini, yaitu mengenai pokok dari perjanjian asuransi jiwa. Pokok dari perjanjian asuransi jiwa ialah berupa jumlah premi dan jumlah uang pertanggungan. Jumlah premi dalam perjanjian asuransi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, dan jumlah uang pertanggungan didasarkan pada besarnya jumlah premi yang diperhitungkan sedemikian rupa oleh pihak penanggung. Dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential unsur esensialia tersebut dapat dilihat pada bagian Ringkasan Polis (dokumen terlampir). Arti penting dari unsur esensialia ialah merupakan syarat untuk adanya perjanjian, ini berlaku pula dalam perjanjian asuransi jiwa, kesepakatan mengenai premi dan uang pertanggungan menandai bahwa perjanjian asuransi jiwa telah lahir. Selain unsur esensialia, dalam suatu perjanjian terdapat unsur lain yaitu unsur aksidentalialia.

Unsur aksidentalialia merupakan unsur dalam suatu perjanjian yang berisi ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Unsur aksidentalialia tidak bersifat mutlak, unsur ini sama sekali belum ditentukan oleh hukum, sehingga terserah kepada para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan kehendak dan kesepakatan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian baku, unsur aksidentalialia ditentukan secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih dominan dalam suatu perjanjian. Dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential unsur aksidentalialia ini ditentukan oleh pihak Prudential, contohnya adalah mengenai cara

pembayaran premi asuransi, maupun cara pembayaran manfaat asuransi.

Penggunaan klausula baku dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential besar kemungkinan menimbulkan ketidakadilan dalam menentukan hak dan kewajiban bagi pihak tertanggung. Guna mengatasi penggunaan klausula baku yang dapat merugikan kepentingan tertanggung, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) diatur mengenai pencantuman klausula baku yaitu:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Selain pengaturan dalam Pasal 18 UUPK, pengaturan mengenai klausula baku juga terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Surat Edaran ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. Aturan ini secara khusus mengatur mengenai klausula dalam perjanjian baku dan format perjanjian baku yang digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan, termasuk oleh perusahaan asuransi.

Klausula baku dalam Pasal 1 angka 10 UUPK, diartikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengertian klausula baku dalam UUPK tersebut apabila dikaitkan dengan Polis Asuransi Jiwa Prudential dapat diartikan bahwa tertanggung terikat pada ketentuan yang terdapat dalam polis yang telah disetujuinya. Kewajiban tertanggung setelah menandatangani polis tersebut adalah mematuhi ketentuan yang ada dalam polis.

Berdasarkan pada asas *duty to read* apabila perjanjian tersebut telah ditandatangani maka mengikat pihak yang bersangkutan. Tidak penting apakah pihak yang menandatangani perjanjian membaca/memahami isi perjanjian baku tersebut. Dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential pencantuman tanda tangan pihak tertanggung terdapat pada Surat Pengajuan asuransi Jiwa (SPAJ), yang dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan polis.

Selain asas *duty to read* dalam perjanjian baku harus memperhatikan asas *public policy*. Dalam sistem hukum *common law*, jika suatu

perjanjian bertentangan dengan *public policy*, maka digolongkan sebagai perjanjian yang ilegal atau tidak sah. Dalam *civil law*, *public policy* disamakan dengan ketertiban umum. Perjanjian yang melanggar ketertiban umum dianggap tidak sah dan batal demi hukum.¹⁰ Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu bahwa suatu sebab dalam perjanjian adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian asuransi jiwa, khususnya Polis Asuransi Jiwa Prudential tidak bertentangan dengan ketertiban umum, karena sebab perjanjiannya yaitu untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun Undang-Undang.

Asas lainnya yang perlu diperhatikan dalam perjanjian baku ialah berlakunya asas *unconscionability*. Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan prinsip *unconscionability* ini adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu perjanjian batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan apabila dalam perjanjian tersebut terdapat klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian yang bersangkutan.¹¹ Kriteria utama agar suatu perjanjian batal atau dapat dibatalkan karena alasan ketidakadilan (*unconscionability*) adalah apakah

klausula dalam perjanjian tersebut terlalu memihak kesatu pihak, sehingga hal tersebut menjadi tidak adil terhadap pihak lainnya menurut situasi dan kondisi pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan. Pada Polis Asuransi Jiwa Prudential, pihak penanggung dalam merumuskan klausula baku, tidak hanya menentukan hak bagi penanggung, tetapi juga hak-hak tertanggung misalnya hak tertanggung untuk mengurungkan diri dari perjanjian pertanggungan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, hak untuk menentukan pilihan mengenai besarnya premi berkala, mengubah besarnya uang pertanggungan, menambah atau mengurangi asuransi tambahan, hak untuk mengajukan penggantian pemegang polis, hak untuk penggantian penerima manfaat (dokumen terlampir). Adanya pengaturan hak-hak tertanggung yang diatur dalam polis ini tidak hanya memihak pada satu pihak saja.

Terkait kewajiban pihak tertanggung untuk mematuhi ketentuan dalam polis yang sudah ditandatanganinya, dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential ada ketentuan bahwa pihak tertanggung dapat mengurungkan niatnya untuk mempertanggungkan diri, dengan mengembalikan polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, sejak polis diterima oleh tertanggung. Dengan syarat, tertanggung belum pernah mengajukan klaim atas manfaat yang ditanggung dalam polis selama jangka waktu tersebut.

Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian apabila dikaji dari sifat kekuatan mengikatnya perjanjian. Dalam suatu perjanjian sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, apabila para

¹⁰ Suhardana, F.X., 2009, *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. hlm. 22.

¹¹ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

pihak sudah sepakat untuk mengikatkan dirinya, maka mereka terikat untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban masing-masing pihak yang sudah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Ketentuan dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian asuransi jiwa belum mengikat pihak tertanggung dan belum menimbulkan akibat hukum bagi tertanggung meskipun polis sudah ditandatangani. Dengan syarat tertanggung belum pernah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, yaitu 14 (empat belas) hari.

Klausula mengenai hak tertanggung untuk mengurungkan diri dari perjanjian asuransi yang dicantumkan dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential, apabila dikaji dari kebebasan berkontrak, merupakan salah satu bentuk implementasi asas kebebasan berkontrak. Klausula tersebut mencerminkan kebebasan para pihak untuk menentukan apakah akan membuat atau tidak membuat suatu perjanjian. Dengan adanya ketentuan bahwa tertanggung dapat membatalkan perjanjian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk membaca dan memahami klausula-klausula dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential. Sehingga tertanggung bisa menimbang kembali apakah ingin benar-benar terikat dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential atau tidak.

Bapak J. Widiyanto berpendapat bahwa salah satu bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi jiwa ialah dengan menyampaikan kepada tertanggung sebelum perjanjian asuransi ditutup semua hak dan kewajiban tertanggung secara jelas,

harus ada keterbukaan dari agen asuransi sebagai tenaga pemasaran mengenai produk yang dijualnya tersebut.

Pada dasarnya penggunaan perjanjian baku tidak dilarang, adanya perjanjian baku juga merupakan bentuk dari kebebasan berkontrak, yaitu bahwa para pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian, bebas untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. UUPK pada dasarnya tidak melarang penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian, asal tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 18 UUPK. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Terkait pengaturan lebih lanjut mengenai perjanjian baku, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Surat edaran ini merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan klausula dalam perjanjian baku yang diatur dalam Pasal 21 dan 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam surat edaran tersebut diatur mengenai klausula baku dalam perjanjian baku serta mengenai format perjanjian baku. Dalam ketentuan mengenai format perjanjian baku, disebutkan bahwa perjanjian baku yang memuat hak dan kewajiban konsumen dan persyaratan yang mengikat konsumen secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda istilah,

frasa yang dapat dibaca, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen.

Polis Asuransi Jiwa Prudential yang menjadi bahan penelitian, banyak menggunakan kalimat-kalimat yang dicetak dalam huruf kecil-kecil dan pengungkapannya sulit untuk dipahami oleh awam. Bapak Satya Wisada Sembiring membenarkan bahwa dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential banyak kalimat yang sulit dipahami, akan tetapi beliau menambahkan bahwa calon tertanggung dapat menanyakan ketidakjelasan tersebut kepada agen asuransi ataupun ke orang-orang yang berhubungan dengan polis tersebut.

Menunjuk pada Pasal 18 ayat (2) UUPK bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti, perjanjian yang mencantumkan klausula baku demikian dinyatakan batal demi hukum (*vide* Pasal 18 ayat (3) UUPK). Tetapi hal ini harus diperhatikan kembali, bahwa pihak penanggung telah memberikan jangka waktu kepada tertanggung selama 14 (empat belas) hari, dalam jangka waktu ini tertanggung dapat membaca dan memahami, atau berkonsultasi kepada pihak Prudential apabila terdapat kalimat atau hal-hal yang tidak bisa dipahami, sehingga meskipun terdapat kalimat yang pengungkapannya sulit dimengerti, hal ini tidak menyebabkan polis batal demi hukum.

Mengenai pemberian jangka waktu yang bagi tertanggung, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku juga ditentukan bahwa

pelaku usaha jasa keuangan memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk membaca dan memahami perjanjian baku sebelum menandatangani atau sebelum efektif berlakunya perjanjian baku. Dalam perjanjian asuransi jiwa, polis asuransi baru terbit setelah tertanggung menyatakan sepakat untuk terikat dengan perjanjian asuransi jiwa, yaitu dengan menyerahkan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), sehingga tertanggung belum mengetahui klausula-klausula yang terdapat di dalam polis. Tetapi dengan diberikannya jangka waktu bagi tertanggung selama 14 (empat belas) hari setelah polis diterima, maka Polis Asuransi Jiwa Prudential sudah menerapkan mengenai pengaturan pemberian jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian diatur bahwa polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Terkait dengan ketentuan tersebut diatas, bahwa suatu polis tidak boleh memuat mengenai ketentuan yang mempersulit tertanggung untuk mengurus haknya. Dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Polis Asuransi Jiwa Prudential Pasal 6.1 mengenai

syarat-syarat permohonan/klaim atas pembayaran manfaat asuransi, penanggung mempersyaratkan 10 (sepuluh) dokumen yang harus disertakan dalam pengajuan permohonan klaim pembayaran atas manfaat asuransi. Selain 10 (sepuluh) dokumen tersebut, penanggung menambahkan bahwa dapat meminta dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu. Pada Pasal 6.4 disebutkan bahwa penanggung mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran manfaat asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

Klausula tersebut sangat memberatkan pihak tertanggung/penerima manfaat, karena penanggung menyatakan berhak menolak klaim/pembayaran manfaat asuransi apabila dokumen-dokumen yang dijadikan persyaratan untuk pengajuan klaim tersebut dirasa belum lengkap oleh pihak penanggung. Klausula ini dapat digolongkan sebagai ketentuan yang mempersulit tertanggung untuk mengurus haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian. Penanggung tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim, tetapi dapat menambah dokumen tersebut, jadi hak tertanggung atas pembayaran klaim atau manfaat asuransi, digantungkan kepada keputusan penanggung, apakah menyatakan dokumen sudah memenuhi syarat atau belum. Klausula ini menurut penulis bisa digolongkan sebagai klausula eksonerasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku diatur ketentuan yang melarang pencatuman klausula dalam perjanjian baku yang memuat mengenai klausula eksonerasi/eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen, dan penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam perjanjian baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi ini misalkan memanfaatkan kondisi tertanggung yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja penanggung tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.

Klausula-klausula eksonerasi (eksemsi) dapat muncul dalam berbagai bentuk, dapat berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi). Bentuk lainnya berupa pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, dapat pula berbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi.¹² Bentuk klausula eksonerasi dalam polis ini yaitu, hak penanggung untuk menolak permohonan klaim/pembayaran manfaat asuransi apabila syarat-syarat untuk pengajuan klaim tidak terpenuhi.

Klausula eksonerasi dalam perjanjian asuransi jiwa sifatnya bukan

¹²Sutan Remy Syahdeini, 1993, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Cetakan Pertama*, Institut bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 76.

meniadakan tanggung jawab, tetapi membatasi tanggung jawab dari penanggung. Penanggung merupakan pihak yang akan memberikan penggantian atau pembayaran kepada tertanggung apabila terjadinya suatu risiko, sebagaimana telah diperjanjikan untuk dialihkan. Dalam perjanjian asuransi jiwa, risiko tersebut adalah meninggalnya si tertanggung, dengan meninggalnya tertanggung maka penanggung akan membayarkan sejumlah manfaat sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, tetapi sebelumnya penerima manfaat harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh penanggung, untuk meyakinkan pihak penanggung bahwa tertanggung meninggal dunia bukan karena sebab-sebab yang dikecualikan dalam Polis Asuransi Jiwa Prudential. Dalam Pasal 307 KUHD juga telah diatur apabila orang yang mempertanggungkan jiwanya bunuh diri atau dihukum mati, pertanggungannya gugur. Berdasarkan pada ketentuan ini, maka dapat dibenarkan tindakan penanggung untuk meminta dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai bukti yang meyakinkan penanggung untuk memberikan pembayaran klaim/manfaat asuransi.

Penggunaan klausula eksonerasi ini dalam perjanjian asuransi jiwa, bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pihak tertanggung. Fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan

(*Gerechtigkeit*).¹³ Keadilan menurut Aristoteles ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan.¹⁴ Dalam perjanjian asuransi jiwa, demi terwujudnya keadilan, hendaknya penentuan hak dan kewajiban di dalam polis asuransi tidak memberatkan bagi pihak tertanggung meskipun yang membuat klausula tersebut adalah penanggung.

Hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi jiwa dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen diatur dalam beberapa Pasal dalam UUPK. Pasal 4 UUPK disebutkan mengenai hak konsumen yang apabila dikaitkan dengan perjanjian asuransi jiwa, maka hak-hak tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa yaitu¹⁵:

- a. hak untuk memilih jenis asuransi jiwa yang ditawarkan;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi jiwa;
- c. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa dan pelayanan petugas asuransi jiwa;
- d. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen jika terjadi sengketa;

¹³Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta. hlm.160.

¹⁴Bernard L. Tanya, dkk, 2013, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta, Yogyakarta. hlm. 42.

¹⁵Neni Sri Imaniyati, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam Sengketa Klaim asuransi*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 30 No. 1 Tahun 2011, Hlm. 48., ISSN : 0852 / 4912 terakreditasi DIKTI No. 52/DIKTI/Kep/2002

- e. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- f. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban Tertanggung sebagai konsumen mengacu pada Pasal 5 UUPK, yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi atau menutup perjanjian asuransi;
- c. membayar sesuai dengan premi yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak Perusahaan Asuransi sebagai pelaku usaha mengacu pada Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. hak menerima pembayaran premi yang sesuai dengan kesepakatan;
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen atau tertanggung yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk merehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha mengacu pada Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai manfaat dan jaminan dari asuransi jiwa yang ditawarkan;
- c. memperlakukan dan melayani tertanggung dengan jujur dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang diderita tertanggung.

Menurut Bapak Widjiantoro selaku Dewan Pembina Lembaga Konsumen Yogyakarta, bentuk keadilan bagi tertanggung adalah dengan memberikan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam perjanjian asuransi jiwa. Misalnya pada saat agen asuransi memberikan informasi mengenai produk asuransi jiwa, informasi yang diberikan tersebut harus sesuai dengan produk itu sendiri, tidak melebih-lebihkan yang kemudian bisa menyebabkan kekecewaan, karena ketika polis sudah diterbitkan ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak tertanggung. Jadi sebelum perjanjian asuransi jiwa ditutup, calon tertanggung sudah memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga di kemudian hari tidak ada sengketa atas pengajuan klaim. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu asas dalam UUPK. Keadilan dalam UUPK yaitu dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.

4. KESIMPULAN

Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi jiwa khususnya pada Polis Asuransi Jiwa Prudential telah diberlakukan, implementasinya tidak hanya menyangkut isi perjanjian, tetapi juga pada saat sebelum perjanjian asuransi jiwa disepakati oleh tertanggung, yaitu dengan adanya hak tertanggung untuk memilih jenis produk asuransi jiwa Prudential yang akan dibeli. Implementasi asas kebebasan berkontrak, terkait dengan isi polis asuransi jiwa terlihat bahwa dalam polis tersebut telah ditentukan hak-hak yang dimiliki oleh tertanggung, contohnya tertanggung diberi hak untuk mengurungkan diri dalam perjanjian asuransi, dengan mengembalikan polis asuransi jiwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak polis diterima oleh tertanggung. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, meskipun polis asuransi jiwa Prudential merupakan perjanjian baku tetapi dengan adanya ketentuan mengenai hak-hak tertanggung, maka Polis Asuransi Jiwa Prudential telah memenuhi asas keadilan.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, ingin memberikan saran yang sekiranya dapat membantu dan berguna bagi semua pihak. Perumusan klausula-klausula yang akan dicantumkan dalam sebuah polis asuransi jiwa, hendaknya melibatkan Lembaga

Perlindungan Konsumen sebagai salah satu unsur yang mewakili kepentingan konsumen, sehingga dalam polis asuransi nantinya tidak ada klausula-klausula yang bertentangan dengan rasa keadilan.

5. REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, cetakan kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2013, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Johannes Gunawan, 2008, *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak* (Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.), Refika Aditama, Bandung.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati, 2011, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam Sengketa Klaim asuransi, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 30 No. 1 Tahun 2011, Hlm. 48., ISSN: 0852 / 4912 terakreditasi DIKTI No. 52/DIKTI/Kep/2002
- Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Ridwan Khairandy, 2011, *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus, Vol. 18 Oktober 2011: 36-55, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Sutan Remy Syahdeini, 1993, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Institut bankir Indonesia, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk wetboek*, 2006, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 2013, Rhedbook Publisher, Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK. 07/2014 tentang Perjanjian Baku